

POPULISME DI ARAS DEMOKRASI INDONESIA

Restu Rahmawati

Prodi Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

restu.rahmawati3@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan mengkaji tentang populisme di aras demokrasi di Indonesia dengan memfokuskan pada perihal kebangkitan kepemimpinan populis di Indonesia, dan peluang serta tantangan populisme bagi aras demokrasi di Indonesia. Alasan mengambil permasalahan ini dikarenakan didalam aras demokrasi seperti sekarang ini, banyak muncul tokoh-tokoh yang dianggap populis seperti Joko Widodo (Jokowi), dan Ridwan Kamil. Artinya semakin suatu negara terjebak didalam badai krisis yang besar, maka disana rakyat akan mencari-cari para pemimpin-pemimpin yang dianggap populis. Di dalam konteks demokrasi saat ini, ketika suatu masyarakat tak memiliki kepemimpinan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan tak adanya manajemen konflik. Posisi populisme disini adalah sebuah seperangkat kepercayaan masyarakat akan pemimpin yang dianggap dapat mengangkat hidup mereka. Disisi lain, adanya masyarakat yang cenderung kurang percaya pada partai politik dan DPR. Padahal kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik ini merupakan indikator tersendiri dari konsolidasi demokrasi. Realita ini makin melempangkan jalan bagi populisme dan mendorong munculnya klaim-klaim populisme dari tokoh-tokoh politik yang ingin “mengail di air keruh”. Merujuk pada permasalahan tersebut maka penulis akan mengangkat permasalahan tentang populisme di aras demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bangkitnya populisme di Indonesia ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh yang dianggap populis seperti Joko Widodo, dan Ridwan Kamil. Hadirnya kepemimpinan populis tersebut mengakibatkan peluang dan tantangan bagi aras demokrasi di Indonesia. Peluang adanya populisme yakni dapat mengingatkan elite politik atas kelemahan demokrasi keterwakilan yang sekarang ini berjalan, dan agar elite tidak lupa menyerap sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Selain peluang, populisme juga melahirkan tantangan diantaranya kaum populis cenderung memanfaatkan demi kepentingan politik elektoral, propaganda dan kharisma personal untuk menarik konstituen daripada tampil sebagai edukator.

Kata Kunci: Populisme, Kepemimpinan Populis, Demokrasi

Abstract

This paper will examine the populism at the level of democracy in Indonesia by focusing on the rise of populist leadership in Indonesia, and the opportunities and challenges of populism for the level of democracy in Indonesia. The reason to take this problem because in the level of democracy like today, many emerging figures that are considered populist like Joko Widodo (Jokowi), or Ridwan Kamil. This means that the more a country falls into the storm of a great crisis, then there the people will be looking for leaders who are considered populist. In the current context of democracy, when a society lacks leadership, what happens is chaos and

lack of conflict management. The position of populism here is a set of public beliefs about leaders who are thought to be able to lift their lives. On the other hand, there are people who tend to be less trust in political parties and DPR. Yet the belief in these public institutions is a separate indicator of the consolidation of democracy. This reality has increasingly paved the way for populism and encourages the emergence of claims of populism from political figures who want to "fish in turbid water". Referring to the problem then the author will raise the issue of populism in the level of democracy in Indonesia. The research method used is qualitative descriptive. The results of this study indicate that the rise of populism in Indonesia is characterized by the emergence of figures considered populists such as Joko Widodo, and Ridwan Kamil. The presence of such populist leadership resulted in opportunities and challenges for the level of democracy in Indonesia. The possibility of the existence of populism that can remind the political elite of the current weakness of representation democracy, and so that the elite does not forget to absorb the maximum interests of the people in the process of policy making. In addition to opportunities, populism also spawns a challenge amongst the populists tend to utilize for the interests of electoral politics, propaganda and personal charisma to attract constituents rather than appear as educators.

Keywords: Populism, Populist Leadership, Democracy

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan mengkaji tentang populisme di aras demokrasi Indonesia. Alasan penulis mengangkat permasalahan ini dikarenakan dewasa ini dalam konteks politik Indonesia muncul istilah "populisme". Istilah populisme ini kemudian terejawantahkan dalam bentuk gerakan populisme, kepemimpinan populisme atau lainnya. Istilah populisme memang sudah dikenal lama dalam perbincangan demokrasi. Namun, bangkitnya populisme di Indonesia mengemuka kembali tatkala hadirnya tokoh-tokoh populis yang dianggap merepresentasikan rakyat. Hadirnya tokoh-tokoh populis ini pun tidak tanpa sebab, akan tetapi hadir karena timbulnya situasi yang membuat rakyat tidak percaya kepada pemerintah yang dianggapnya gagal dalam mensejahterakan rakyat. Pada saat terjadi situasi seperti itu, maka rakyat akan semakin memimpikan dan mencari sosok pemimpin yang dapat menampung kepentingan mereka.

Selain gagalnya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dan menumbuhkan ekonomi rakyat, problem dalam demokrasi representatif pun turut memberikan andil bagi lahirnya bibit-bibit populisme di Indonesia. Tak pelak, rakyat pun kehilangan kepercayaan terhadap institusi demokrasi yang dianggapnya tidak lagi dapat menampung aspirasi rakyat. Pada titik inilah kaum populis akan mengambil kesempatan.

Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang menganut prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, maka kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada saat kedaulatan ada di tangan rakyat, maka dalam proses *governing* dan pembuatan keputusan rakyat harus dilibatkan. Namun apa yang terjadi dalam realita saat ini, perilaku elit politik cenderung tidak mencerminkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Tentu saja ini mengejutkan bahwa institusi demokrasi tidak dijalankan dengan nilai-nilai demokrasi, prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat pun menjadi bermasalah. Elit politik menguasai institusi demokrasi dan melemahkan kedaulatan rakyat. Secara relitas, rakyat memang dilibatkan pada saat pemilu, namun rakyat tidak dilibatkan dalam proses *governing* dan pengambilan keputusan. Ini artinya ada kesenjangan dalam pelibatan publik dalam pengambilan keputusan.

Lembaga demokrasi yang telah banyak bermunculan di Indonesia dapat menciptakan demokrasi yang sifatnya substansial seperti yang didefinisikan oleh David Beetham (menekankan kontrol rakyat atas urusan publik yang didasarkan kesetaraan politik). Dijawab oleh Mietzner di tahun 2012, ia mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami stagnasi dalam kurun waktu 16 tahun. Kemunculan lembaga demokrasi secara massif tidak diiringi dengan realisasi dari

pemaknaan demokrasi. Singkatnya, tersedianya institusi demokrasi yang sangat banyak, ternyata belum mampu menciptakan substansi dari demokrasi yang memudahkan masyarakat awam dapat mengakses dan mengontrol urusan publik. (Yodi, 2017: 121-140) Realita seperti inilah yang menyebabkan bangkitnya populisme dalam aras demokrasi di Indonesia.

Pasca orde baru, dimana terjadi perubahan zaman menjadi kontemporer yang tercermin dari kontekstualisasi struktur sosial, ekonomi politik, historisitas serta pluralitas dari artikulasi politik yang lebih kontemporer. Maka kenyataan ini pun memberikan andil dalam memunculkan populisme. Mari kita lihat, kepemimpinan publik pasca orde baru di Indonesia, banyak muncul tokoh-tokoh yang merepresentasikan rakyat seperti Joko Widodo, dan Ridwan Kamil. Apakah hadirnya tokoh-tokoh tersebut yang mampu merebut suara rakyat menandakan bangkitnya populisme di Indonesia? Merujuk pada persoalan tersebut, maka penulis akan mengkaji persoalan bagaimana bangkitnya populisme di Indonesia pasca orde baru. Selain itu akan dijawab bagaimana peluang dan tantangan dari populisme bagi demokrasi di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji populisme di Indonesia pasca orde baru dan untuk melihat peluang dan tantangan dari populismr bagi demokrasi di Indonesia sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih jernih dalam melihat fenomena politik kontemporer mengenai populisme ditengah realitas dan kontekstualisasi dari artikulasi politik kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yakni *library research* (studi pustaka). Kemudian untuk teknik analisis data, data dianalisis dengan menggunakan empat tahap yakni *pertama*, tahap pemilahan (*sortiring*) data yang terkait dengan resistensi kelompok pendidik. *Kedua*, tahap klasifikasi (*categorizing*) dengan melakukan perbandingan antara data yang satu dengan yang lain. *Ketiga*, tahap komparasi yakni dengan melakukan perbandingan antara data yang satu dengan yang lain. Dan *keempat* tahap sintesis (*synthesizing*) dengan melakukan penafsiran terhadap data dan mengaitkannya dengan kerangka teori sehingga dapat dipahami fenomena populisme tersebut (Newman, 1997: 427).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bangkitnya Populisme di Indonesia Pasca Orde Baru

Istilah populisme bukan hal yang baru dalam konteks politik di Indonesia, baik dalam segi teori maupun implementasinya. Populisme merupakan sebuah istilah yang masih diperdebatkan oleh para sarjana. Berdasarkan pengalaman yang terjadi di benua Amerika Latin pada 1940-1960an, populisme diidentikkan dengan rezim personalistik yang berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat dimana perkembangan organisasi dan institusi telah dilumpuhkan. Banyak sarjana dan analis beranggapan bahwa istilah populisme merujuk pada gaya rejim dimana pemimpin politiknya menggunakan gaya personalistik.

Pendapat Allan Knight menjelaskan bahwa populisme merupakan sebuah gaya politik khusus yang memperlihatkan adanya kedekatan hubungan dengan rakyat (Knight, 1998: 17-32). Selain itu, Kenneth M. Roberts juga menyatakan bahwa populisme merupakan mobilisasi politik massa dari atas ke bawah yang dilakukan oleh pemimpin personalistik untuk menentang sekelompok elit dengan mengatasnamakan penderitaan rakyat (*the top-down political mobilization of mass constituencies by personalistic leaders who challenge elite groups on behalf of an illdefined pueblo, or "the people"*) (Roberts, 2011). Berdasarkan definisi Knight, dan Roberts tersebut nampak jelas bahwa populisme merupakan strategi yang digunakan oleh pemimpin untuk mencapai kekuasaan baik itu sebagai gaya politik maupun sebagai model penggerakan (mobilisasi) massa.

Seperti kita ketahui bahwa populisme dalam sejarah Indonesia mempunyai karakter yang berbeda di setiap era. Misalnya pada era Soekarno populisme justru bergerak ke arah progresif, menjadi alat konsolidasi populer menentang neokolonialisme dalam rangka mewujudkan neokolonialisme dalam rangka mewujudkan mimpi Soekarno untuk menciptakan "Sosialisme ala Indonesia". Dalam hal ini, Soekarno dikategorikan sebagai pemimpin populis karena memiliki gaya kepemimpinan yang kharismatik dan dekat dengan rakyat.

Populisme di tahun 1960-an berpuncak pada karakter dan peran simbolis Soekarno sebagai pemersatu bangsa dan proklamator kemerdekaan untuk menolak apa yang disebutnya dengan neokolonialisme dan neoimperialisme (neokolim). Populisme Soekarno ditopang oleh aliansi politik yang mendukung kepemimpinannya dalam konsepsi persatuan nasional yang disebutnya dengan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom).

Jatuhnya Soekarno menandai periode panjang pembekuan populisme. Rezim orde baru Soeharto secara sistematis telah memberangus demokrasi dan ekspresi-ekspresi populisme melalui depolitisasi dan de-Sukarnoisasi. Namun proses tersebut tetap gagal. Meski beku, populisme tetap berada di benak rakyat, membentuk alam pikiran politik yang menuntun sejumlah aktor politik menyeru dan memobilisasi rakyat. Letupan-letupan gerakan populis tetap muncul seperti dalam protes SDSB (1991), penolakan pemilu 1997, dan perjalanan panjang gerakan mahasiswa 1998-1999.

Pasca Orde Baru, yang penulis soroti adalah pada era Jokowi. Mengapa bukan Susilo Bambang Yudhoyono? Penulis melihat bahwa pada era Jokowi lah rakyat begitu antusias dan begitu mengelu-elukan sosok Jokowi yang dianggapnya dekat dengan rakyat. Kepopuleran seorang Jokowi akhirnya tidak hanya pada lingkup wilayah Solo saja namun kemudian meluas hingga ke pelosok nusantara. Pada pemilihan umum Presiden dan Calon Presiden Republik Indonesia yang diadakan pada bulan Juli 2014 lalu, Joko Widodo dan Jusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019. Joko Widodo - Jusuf Kala memperoleh suara sebesar 53,5 per sen, sementara pesaingnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat suara sebesar 46,85 per sen. Mayoritas rakyat Indonesia memilih Jokowi karena Jokowi diyakini merupakan pemimpin populis yaitu pemimpin yang peduli pada rakyat kecil.

Jokowi hadir benar-benar mencerminkan tokoh populis dengan kebijakan-kebijakan populisnya. Pada era Jokowi, populisme lebih bersandar pada figur Jokowi itu sendiri. Populisme politik pada era Jokowi lebih didasarkan pada

kekecewaan rakyat terhadap negara dan partai politik yang dianggap korup dan oligarkhi. Kekecewaan terhadap negara dan partai politik tersebut pada akhirnya ditunjukkan dengan partisipasi elektoral mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Rakyat memilih Jokowi karena Jokowi dianggap jujur, dan sederhana. Jokowi dianggap sebagai representasi masyarakat, seperti dalam slogan kampanye “Jokowi adalah kita”.

Kemunculan sosok Jokowi dalam membangun relasi dukungan personal oleh gerakan relawan yang tidak diikat dalam sebuah organisasi partai politik merupakan ciri dari sebuah gerakan populisme. Populisme Jokowi mulai dibangun saat menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta melalui program populis di bidang kesehatan dan pendidikan untuk rakyat miskin. Populisme Jokowi ini makin kuat dengan pendekatan “blusukan” untuk mengetahui problem langsung masyarakat dan mendiskusikan solusinya dengan mereka. Kesan pejabat negara yang angkuh, birokratis, korup dan formal serta berjarak, ia runtuhkan dengan dialog dan informalitas. Dan pendekatan ini masih ia lakukan sampai hari ini sebagai “*JokoWay*” dalam menjalankan program Nawacita.

Selain Jokowi, tokoh populis lainnya yang muncul pasca orde baru adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah walikota Bandung yang terkenal dekat dengan rakyat dan menciptakan terobosan kebijakan yang inovatif guna merealisasikan harapan warga Bandung dan membuat kebijakan yang berpijak pada aspirasi rakyat. Dalam konteks kontemporer, hadirnya Ridwan Kamil pun menjawab harapan masyarakat akan hadirnya pemimpin yang membawa perubahan bagi masyarakat. Merujuk pada kedua contoh tokoh populis tersebut,

maka apakah keduanya merupakan pertanda bangkitnya kembali populisme di Indonesia pasca orde baru? Maka jawabannya adalah iya.

Populisme di Indonesia bangkit lebih dikarenakan adanya ketidakpercayaan publik kepada negara dan partai politik, dan lemahnya penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas sehingga rakyat lebih percaya kepada sosok pemimpin populis. Beda halnya yang terjadi di Turki. Di Turki, misalnya populisme Islam lebih banyak disatukan oleh program dan kegiatan kepedulian sosial yang dimiliki oleh *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP). Sifat mendasar inilah yang membedakan populisme Islam di Turki dengan Mesir dan Indonesia, yang lebih banyak disatukan dengan visi-misi politik. Dengan menjangkau kelas-kelas sosial yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin, kekuatan AKP justru sangat mengakar di kalangan akar rumput. Bahkan, karena sifat gerakannya yang elantropis, AKP, dalam kasus kemenangan Erdogan sebagai presiden baru Republik Turki, lebih bisa menjamin keseimbangan aliansi antar kelas yang terbentuk. Selain itu, AKP pun memiliki keunggulan dengan tidak memiliki saingan yang sangat kompetitif dalam perjuangan memperoleh kekuasaan (Garadian, 2017: 379-394). Dengan demikian, bangkitnya populisme di Indonesia harus kita sikapi dengan baik. Karena begitu banyak yang mendukung dan menghakimi bangkitnya populisme di Indonesia. Kiranya, bangkitnya populisme ini harus kita lihat peluang dan tantangannya supaya bangkitnya populisme ini tidak menghancurkan bangunan demokrasi yang sudah kita anut sekian lama. Jangan sampai, dengan bangkitnya populisme justru menghancurkan bangunan demokrasi yang sudah berdiri lama.

Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa populisme di Indonesia mencerminkan populisme *ideology, discursive style*, dan strategi politik. Sebagai ide, populisme dilihat dari visinya adalah memberikan pelayanan publik yang *acesesible* untuk masyarakat miskin dengan pendidikan, kesehatan, dan upaya penanggulangan kemiskinan. Secara simbol dapat mewujudkan pada pernyataan yang dikeluarkan oleh Jokowi dan Ridwan Kamil mengenai kemiskinan. Sedangkan strategi politik yang mewujudkan pada kebijakan dilakukan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat pro-poor (Rahmah, & Azizah, 2016: 20).

2. Peluang Populisme bagi Demokrasi di Indonesia

Bangkitnya populisme di Indonesia akan membuka jalan bagi masyarakat untuk memberikan ekspresi bagi kekuasaan yang sedang berkuasa sehingga tidak nampak birokrasi sangat dominan. Selain itu, populisme juga cenderung menjadi dewa penyelamat bagi masyarakat yang termarginalkan. Poin penting *direct democracy* atau *participatory democracy* adalah gagasan tentang pentingnya partisipasi publik di dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para wakil yang memiliki otoritas. Demokrasi yang baik itu tidak hanya berkaitan dengan prosedur dan isi (*procedure and content*) melainkan juga berkaitan dengan hasil (*result*) dari prosedur dan isi dalam demokrasi tersebut (Morlino, 2002 dalam Alamsyah, 2014: 4).

Partisipasi politik masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik akan membuka jalan bagi terciptanya suatu kebijakan yang menjawab permasalahan masyarakat. Hasil dari prosedur dan isi dalam demokrasi

inilah yang mencoba disentuh oleh kaum populis, sehingga pada akhirnya rakyat dapat berpartisipasi. Misalnya Joko Widodo dan Ridwan Kamil pada saat akan membuat kebijakan, kedua tokoh populis tersebut membuka kesempatan kepada warganya untuk menyampaikan aspirasinya mengenai kebijakan yang akan mereka buat. Dengan demikian, maka bangkitnya kepemimpinan populisme di Indonesia telah berpeluang membuka jalan bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik.

3. Tantangan Populisme bagi Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Indonesia terbilang mapan. Indonesia telah memiliki semua institusi yang dibutuhkan untuk menjalankan demokrasi sebaik-baiknya. Pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah berjalan. Partai-partai bebas berdiri dan berhak mengikuti pemilu yang telah dijalankan secara demokratis. Kini tantangannya adalah memfungsikan dengan baik institusi-institusi demokrasi tersebut, karena sejatinya demokrasi didesain untuk menjamin dan mendorong kedaulatan rakyat. Inilah kemudian yang menjadi tantangan bagi tokoh-tokoh populis di Indonesia yakni memfungsikan institusi-institusi demokrasi.

Selain itu, tantangan lainnya adalah bahwa ada kecenderungan kaum populis memanfaatkan situasi demi kepentingan politik elektoral, propaganda dan kharisma personal untuk menarik konstituen daripada tampil sebagai edukator. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku elite politik tersebut mencerminkan populisme yang tidak progresif, yakni populisme yang dibangun hanya untuk

memuaskan kepentingan elit semata. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan bagi demokrasi.

D. KESIMPULAN

Populisme di Indonesia sudah muncul sejak era Soekarno dan bangkit kembali pada pasca orde baru yang ditandai dengan hadirnya sosok Jokowi. Bangkitnya populisme pasca orde baru disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan publik kepada negara dan partai politik, serta lemahnya penegakan hukum yang dirasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas sehingga rakyat lebih percaya kepada sosok pemimpin populis. Bangkitnya populisme di Indonesia akan membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan ekspresi bagi kekuasaan yang sedang berkuasa sehingga tidak nampak birokrasi sangat dominan. Namun, meskipun demikian rakyat pun harus hati-hati dengan bangkitnya populisme di Indonesia karena kaum populisme memiliki kecenderungan memanfaatkan situasi demi kepentingan politik elektoral. Oleh karena itu, dalam konteks politik elektoral dibutuhkan pemilih yang cerdas.

Ditengah pro dan kontra para ahli dalam memandang populisme, maka kebangkitan populisme harus menjadi peluang yang baik bagi tegaknya kembali nilai-nilai demokrasi, mengembalikan peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bukan sebaliknya menjadi penghancur bangunan sistem demokrasi yang sudah dianggap mapan karena sejatinya tujuan dibalik populisme adalah bahwa rakyat banyak harus memiliki kesempatan dalam masyarakat dan berperan aktif dalam pemerintahan.

Dengan demikian, populisme di Indonesia mencerminkan populisme *ideology, discursive style*, dan strategi politik. Sebagai ide, populisme dilihat dari visi dan misinya adalah memberikan pelayanan publik yang *acesesible* untuk masyarakat miskin dengan pendidikan, kesehatan, dan upaya penanggulangan kemiskinan. Secara simbol dapat mewujudkan pada pernyataan yang dikeluarkan oleh Jokowi dan Ridwan Kamil mengenai kemiskinan. Sedangkan strategi politik yang mewujudkan pada kebijakan dilakukan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat *pro-poor*. Namun, derajat populisme yang berkembang dapat bergantung pada aktor, bagaimana pemaknaan terhadap konteks dan kepentingan masing-masing aktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. N. "Fenomena Electocracy dalam Pilkada Langsung di Indonesia". *Jurnal Academica Untad*: 4 nomor 1. (2014):767-768
- Garadian, E. A. "Membaca Populisme Islam Model Baru". *Studia Islamika*: 24 nomor 2. (2017):45
- Knight, Alan. "Populism and Neopopulism in Latin America, Especially Mexico", *Journal of Latin American Studies*: 30, Nomor 2. (1998) : 76
- Newman, W. Lawrence: *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Allyan & Bacon: Needham Heights, 1997).
- Rahmah, A. N. N., & Nur Azizah, S. I. P. *Politik Populisme Elit (Studi Kasus Bekerjanya Populisme Walikota Pekalongan (HM Basyir Ahmad) Periode 2005-2010 dan 2010-2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2016)
- Roberts, Kenneth M. "Latin America's Populist Revival", *SAIS Review*, Vol. XXVII No. 1 (Winter-Spring). Sianipar, Imelda Masni Juniaty. 2011. (Kebangkitan Populisme di Amerika Latin. Tesis. Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007)

Sapitri, P. *Kritik Tesis Francis Fukuyama Atas Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Sianipar, I. M. J.. Strategi Populis Baru Indonesia Mencapai Kekuasaan. *Sociae Polites*, 16 nomor 1. (2017) : 22-23

Weyland, Kurt. "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics", *Comparative Politics*: 34, Nomor 1. (2001): 56

Yodi, A. S. "Kombinasi untuk Penguatan Demokrasi: Kapasitas Lembaga Representasi Politik di Surakarta oleh PDI-P dan KOMPIP. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*", 2 nomor 2. (2017): 56